



**P-RKPD
PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**20
25**



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah yang disusun dalam suatu dokumen perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan, dan perubahan Lokasi kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah Tahun 2025.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I tahun 2025
 - c. bab III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD;
 - e. bab V : rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI : penutup.
- (2) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2025



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Mei 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 27

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Keterkaitan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Capaian Kinerja Keuangan	II-1
2.2 Evaluasi Kinerja Utama	II-3
2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-7
2.4 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-28
2.5 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan	II-68
2.6 Evaluasi Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-80
2.7 Evaluasi Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-86
2.8 Evaluasi Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-99
2.9 Evaluasi Kinerja Unsur Kewilayahan	II-102
2.10 Evaluasi Kinerja Unsur Pemerintahan Umum	II-115
2.11 Identifikasi Permasalahan	II-120
2.11.1 Identifikasi Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-120
2.11.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-120
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1

3.1.2	Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III-2
3.1.3	Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	III-3
3.1.4	Proyeksi dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	III-4
3.1.5	Kondisi Perekonomian Kabupaten Temanggung	III-6
3.1.6	Proyeksi dan Arah Pembangunan Kabupaten Temanggung	III-7
	3.1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-8
	3.1.6.2 Struktur Ekonomi	III-10
	3.1.6.3 PDRB Per Kapita	III-12
	3.1.6.4 Inflasi	III-14
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-18
3.2.2	Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-27
	3.2.2.1 Persentase Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah	III-30
	3.2.2.2 Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	III-30
	3.2.2.3 Persentase Belanja Transfer terhadap Belanja Daerah	III-31
	3.2.2.4 Persentase Belanja Tidak Terduga	III-32
3.2.3	Arah Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-32
	3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	III-33
	3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	III-33
3.3	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	III-37
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1	Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2025-2045	IV-3
	4.1.1 Visi	IV-3
	4.1.2 Misi	IV-3
4.2	Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-5
	4.2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-5
	4.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	IV-9
4.3	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-14
	4.3.1 Tema Pembangunan Tahun 2025	IV-14
	4.3.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025	IV-14
4.4	Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka	

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045	IV-78
4.5 Kontribusi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 pada Tahun 2025	IV-83
4.6 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Tahun 2025	IV-84
4.7 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target SDGs Kabupaten Temanggung	IV-85
4.8 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	IV-88
4.9 Sasaran dan Program Daerah dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	IV-89
4.10 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Penanganan Stunting Kabupaten Temanggung	IV-90
4.11 Dukungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-92
4.12 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah	IV-95
4.13 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah	IV-96
4.14 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Swasembada Pangan Kabupaten Temanggung	IV-98
4.15 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Temanggung	IV-99
4.16 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Temanggung	IV-100
4.17 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim	IV-102
4.18 Fasilitasi Perubahan Iklim	IV-104
4.19 Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-106
4.20 Kebijakan dan Strategi Hasil Musrenbang RKPD 2025	IV-112
4.21 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	IV-121
4.22 Penyelenggaraan Pengendalian Pemerintahan Daerah	IV-122

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

V-1

5.1	Rencana Kerja Daerah	V-1
5.1.1	Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 Kabupaten Temanggung Terhadap Prioritas Nasional (PN)	V-1
5.1.2	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	V-94
5.1.3	Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)	V-145
5.1.4	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur	V-162
5.1.5	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Pembangunan Pintu Tol Bawen-Yogyakarta	V-164
5.1.6	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Aksi Konversi Stunting	V-165
5.1.7	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap SDGs	V-167
5.1.8	Dukungan Program RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Terhadap Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-176
5.2	Pendanaan Daerah	V-177
5.2.1	Kegiatan Prioritas Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-177
5.2.2	Pagu Indikatif Per Program Berdasarkan Urusan dan Bidang	V-198
BAB VI PENUTUP		VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	II-1
Tabel 2.2	Simbol dan Status Capaian Kinerja	II-3
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Bulan Mei 2025	II-5
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d Mei Tahun 2025	II-8
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d Mei Tahun 2025	II-13
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Mei Tahun 2025	II-17
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d Mei Tahun 2025	II-20
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Mei Tahun 2025	II-22
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Mei Tahun 2025	II-24
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Mei Tahun 2025	II-26
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja s.d Mei Tahun 2025	II-29
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Mei Tahun 2025	II-32
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan s.d Mei Tahun 2025	II-34
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan s.d Mei Tahun 2025	II-36
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup s.d Mei Tahun 2025	II-38
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Mei Tahun 2025	II-41
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s.d Mei Tahun 2025	II-43
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Mei Tahun 2025	II-46
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan s.d Mei Tahun 2025	II-49
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika s.d Mei Tahun 2025	II-52

Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Mei Tahun 2025	II-54
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal s.d Mei Tahun 2025	II-57
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga s.d Mei Tahun 2025	II-59
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik s.d Mei Tahun 2025	II-61
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan s.d Mei Tahun 2025	II-63
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan s.d Mei Tahun 2025	II-65
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan s.d Mei Tahun 2025	II-67
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan s.d Mei Tahun 2025	II-69
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata s.d Mei Tahun 2025	II-71
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian s.d Mei Tahun 2025	II-73
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan s.d Mei Tahun 2025	II-76
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian s.d Mei Tahun 2025	II-79
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah s.d Mei Tahun 2025	II-81
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD s.d Mei Tahun 2025	II-85
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan s.d Mei Tahun 2025	II-87
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan s.d Mei Tahun 2025	II-91
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian s.d Mei Tahun 2025	II-94
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan s.d Mei Tahun 2025	II-96
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan s.d Mei Tahun 2025	II-98
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan s.d Mei Tahun 2025	II-100
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan s.d Mei Tahun 2025	II-103
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum s.d Mei Tahun 2025	II-116
Tabel 3.1	Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025	III-3
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025	III-5
Tabel 3.3	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Temanggung, Jawa	

	Tengah dan Nasional Tahun 2025	III-9
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung ADHK Tahun 2018-2023	III-10
Tabel 3.5	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	III-13
Tabel 3.6	Inflasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional	III-14
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 dan APBD Tahun 2025	III-22
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025	III-24
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Tahun 2022-2024	III-28
Tabel 3.10	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025	III-29
Tabel 3.11	Persentase Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-30
Tabel 3.12	Persentase Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-31
Tabel 3.13	Persentase Belanja Transfer Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-31
Tabel 3.14	Persentase Belanja Tidak Terduga Terhadap Belanja Daerah RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	III-32
Tabel 3.15	Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung P-RKPD Tahun 2025	III-34
Tabel 3.16	Kerangka Pendanaan Kabupaten Temanggung Perubahan RKPD Tahun 2025	III-35
Tabel 4.1	Keterkaitan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.2	Keselarasan Target Indikator Makro RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	IV-9
Tabel 4.3	Tema RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-14
Tabel 4.4	Prioritas dan Fokus Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-25
Tabel 4.5	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025	IV-27
Tabel 4.6	Persandingan antara Asta Cita dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung	IV-30
Tabel 4.7	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Sasaran PN RKP Tahun 2025	IV-32
Tabel 4.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-41
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis, Strategi	

	dan Arah Kebijakan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-44
Tabel 4.10	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025	IV-63
Tabel 4.11	Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	IV-66
Tabel 4.12	Keterkaitan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-81
Tabel 4.13	Keterkaitan Tujuan SDGs, Sasaran Daerah dan Prioritas Daerah di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025	IV-86
Tabel 4.14	Sasaran, dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	IV-88
Tabel 4.15	Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Makan Gratis Bergizi (MBG)	IV-90
Tabel 4.16	Sasaran dan Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Penanganan Stunting	IV-90
Tabel 4.17	Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Program yang Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	IV-93
Tabel 4.18	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengendalian Inflasi di Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-96
Tabel 4.19	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-97
Tabel 4.20	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Dukungan SWasembada Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-100
Tabel 4.21	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengembangan Industri Kerajinan, dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-101
Tabel 4.22	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-101
Tabel 4.23	Sasaran dan Prioritas Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-105
Tabel 4.24	Ketersediaan Komponen SPM RPD Kabupaten Temanggung	IV-108
Tabel 4.25	Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Pemenuhan SPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-110
Tabel 4.26	Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2025 Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	IV-114
Tabel 5.1	Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah	

	Kabupaten Temanggung Prioritas Nasional dalam RKP 2025	V-2
Tabel 5.2	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	V-4
Tabel 5.3	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	V-9
Tabel 5.4	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	V-33
Tabel 5.5	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	V-39
Tabel 5.6	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	V-59
Tabel 5.7	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	V-66
Tabel 5.8	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	V-72
Tabel 5.9	Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Temanggung Terhadap PN 8 : Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur	V-87
Tabel 5.10	Dukungan Program Daerah dalam RKD Tahun 2025-2026 dan Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2025 terhadap Program Prioritas/Kegiatan Prioritas Masing-Masing PN RKP Tahun 2025	V-94
Tabel 5.11	Rekapitulasi Dukungan Program dan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	V-95
Tabel 5.12	Dukungan Program Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung: Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, Perumahan dan Permukiman	V-101
Tabel 5.13	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Makan Bergizi Gratis (MBG)	V-115

Tabel 5.14	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim	V-118
Tabel 5.15	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Pengendalian Inflasi Daerah	V-133
Tabel 5.16	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	V-136
Tabel 5.17	Dukungan Program Daerah Terhadap Prioritas Pembangunan Swasembada Pangan	V-142
Tabel 5.18	Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	V-144
Tabel 5.19	Keruntutan Kebijakan Pembangunan Daerah RKPD 2025 yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)	V-146
Tabel 5.20	Dukungan Program dan Kegiatan Kabupaten Temanggung Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur Tahun 2025	V-162
Tabel 5.21	Program Daerah yang Mendukung Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025	V-165
Tabel 5.22	Program Daerah yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pengarusutamaan Gender	V-167
Tabel 5.23	Pemetaan Indikator SDGs dalam Dokumen Perencanaan Daerah	V-176
Tabel 5.24	Program Daerah yang Mendukung Adptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	V-176
Tabel 5.25	Rekapitulasi Anggaran Per Urusan dan Per Bidang	V-198
Tabel 5.26	Rencana Pembiayaan Per Urusan dan Program	V-201

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan dokumen lain	I-5
Gambar 2.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran sampai dengan Mei Tahun 2025	II-119
Gambar 2.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian Kinerja Indikator IKUPD dan Indikator Program sampai dengan Mei Tahun 2025	II-120
Gambar 3.1	Persentase Sumbangan Sektor Utama terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-11
Gambar 3.2	Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan Tertinggi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	III-12
Gambar 3.3	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	III-20
Gambar 3.4	Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025	III-22
Gambar 4.1	Komponen penyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-1
Gambar 4.2	Konsep THIS dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025	IV-24
Gambar 4.3	Contoh Implementasi Konsep THIS dalam Penentuan Prioritas Pembangunan	IV-25
Gambar 4.4	Keterkaitan dan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Temanggung dengan Arah Kebijakan RPD	IV-26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

RKPD Kabupaten Temanggung 2025 merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah resmi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 pada tanggal 20 Juni 2024. Dokumen ini sudah menjadi acuan resmi semua Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dalam semester pertama Tahun 2025 ini. Namun karena munculnya beberapa permasalahan dan kebutuhan dalam dinamika pembangunan daerah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pembangunan di enam bulan pertama tahun 2025 maka Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu untuk dilakukan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan sebagaimana menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian terhadap alokasi belanja untuk efisiensi belanja daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Penyesuaian alokasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan harga;
- b. Penghapusan kegiatan karena menyesuaikan kemampuan keuangan, penambahan kegiatan baru yang disesuaikan dengan nomenklatur DAK oleh Pusat, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Penyesuaian saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk Tahun berjalan mempedomani hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban LPP APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024

Fokus kebijakan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi;
- b. Optimalisasi Reformasi Birokrasi (*good governance*);
- c. Penanggulangan kemiskinan; dan
- d. Pemerataan pembangunan wilayah dan lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

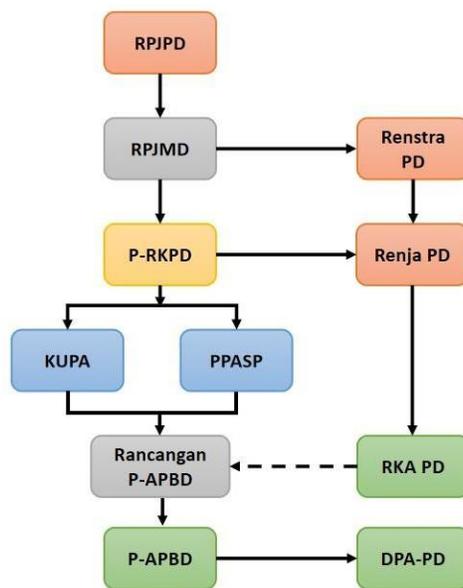
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
34. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
 44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
 45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 46. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025; dan
 47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3 Keterkaitan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dengan dan tetap berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan Renstra. Selain berdasarkan evaluasi

capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dokumen Perbuahan RKPD juga disusun berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk penyesuaian struktur anggaran. Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang nantinya menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen tersebut tergambar dalam bagan sebagai berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen P-RKPD dengan Dokumen Lain

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 triwulan I.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025; dan
- Menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Temanggung

Tahun 2025 meliputi:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 meliputi sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan kinerja sasaran pembangunan dan program semua urusan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten

Temanggung Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Capaian Kinerja Keuangan

Upaya pencapaian target pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan/ keuangan yang dalam hal ini terkait pembiayaan Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap belanja langsung pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung. Pendanaan belanja langsung tersebut dialokasikan tidak hanya untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 namun juga telah disinkronkan dengan dukungan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah maupun prioritas nasional.

Realisasi anggaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025
sampai dengan Triwulan I

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	720.148.835.923,20	121.966.363.913,00	16,94
2	Dinas Kesehatan	187.004.832.184,00	38.684.014.238,00	20,69
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	166.296.800.000,00	29.502.747.003,00	17,74
4	Puskesmas Parakan	3.073.442.000,00	533.034.077,00	17,34
5	Puskesmas Traji	1.618.259.980,00	283.430.294,00	17,51
6	Puskesmas Kledung	2.307.166.616,00	346.154.238,00	15,00
7	Puskesmas Bansari	2.230.631.000,00	329.893.179,00	14,79
8	Puskesmas Bulu	3.900.346.000,00	734.168.365,00	18,82
9	Puskesmas Temanggung	3.202.971.664,00	401.157.888,00	12,52
10	Puskesmas Dharma Rini	2.547.172.752,00	445.135.092,00	17,48
11	Puskesmas Tlogomulyo	2.000.609.000,00	242.499.180,00	12,12
12	Puskesmas Tembarak	2.760.934.000,00	368.442.649,00	13,34
13	Puskesmas Selopampang	2.684.473.000,00	382.923.813,00	14,26
14	Puskesmas Kranggan	2.181.816.312,00	335.131.333,00	15,36
15	Puskesmas Pare	1.563.708.959,00	138.253.632,00	8,84
16	Puskesmas Pringsurat	2.509.565.294,00	499.123.740,00	19,89
17	Puskesmas Rejosari	1.951.612.000,00	310.732.665,00	15,92
18	Puskesmas Kaloran	2.215.331.825,00	388.986.103,00	17,56
19	Puskesmas Tepusen	1.653.066.000,00	300.608.402,00	18,18
20	Puskesmas Kandangan	3.969.423.680,00	623.059.533,00	15,70
21	Puskesmas Kedu	3.447.182.000,00	673.650.393,00	19,54
22	Puskesmas Ngadirejo	4.264.150.000,00	652.811.470,00	15,31
23	Puskesmas Banjarsari	1.910.910.112,00	272.116.567,00	14,24
24	Puskesmas Jumo	2.414.357.000,00	307.134.942,00	12,72
25	Puskesmas Gemawang	3.357.113.000,00	537.712.129,00	16,02
26	Puskesmas Candiroto	2.900.755.000,00	490.578.689,00	16,91
27	Puskesmas Bejen	3.683.893.000,00	668.583.282,00	18,15
28	Puskesmas Tretep	1.959.150.000,00	351.582.777,00	17,95
29	Puskesmas Wonobojo	3.507.093.862,00	843.944.519,00	24,06
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.418.676.555,00	3.759.004.710,00	8,66
31	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	35.793.233.331,00	5.551.650.634,00	15,51

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
32	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	12.827.611.876,00	2.234.298.619,00	17,42
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.118.524.946,00	720.397.067,00	14,07
34	Dinas Sosial	31.074.399.992,00	3.155.462.345,00	10,15
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.065.591.949,03	1.899.562.858,00	11,13
36	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	54.404.312.536,00	6.721.193.463,00	12,35
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.744.692.396,00	1.450.975.584,00	21,51
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.681.175.222,00	1.789.131.612,00	23,29
39	Dinas Perhubungan	25.011.609.542,77	4.506.060.547,00	18,02
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.383.870.825,00	1.759.568.212,00	18,75
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	15.977.113.248,00	3.687.388.718,00	23,08
42	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.910.087.623,00	776.577.443,00	19,86
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	13.009.840.163,00	899.521.719,00	6,91
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.653.644.143,00	1.066.649.613,00	18,87
45	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.162.033.075,00	1.654.671.346,00	20,27
46	Bagian Pemerintahan	225.824.025,00	7.726.000,00	3,42
47	Bagian Hukum	934.165.250,00	16.700.703,00	1,79
48	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	25.753.033.050,00	680.769.815,00	2,64
49	Bagian Perekonomian	676.593.100,00	30.570.606,00	4,52
50	Bagian Pembangunan	87.285.720,00	10.834.703,00	12,41
51	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	116.477.400,00	24.965.409,00	21,43
52	Bagian Umum	28.220.337.693,00	5.348.275.717,00	18,95
53	Bagian Organisasi	51.346.600,00	2.822.000,00	5,50
54	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.192.351.800,00	210.375.392,00	9,60
55	Sekretariat DPRD	48.962.662.482,00	9.127.146.205,00	18,64
56	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.092.423.032,00	1.596.904.436,00	19,73
57	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	417.515.857.016,00	39.823.098.205,00	9,54
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.177.541.150,00	1.259.477.911,00	20,39
59	Inspektorat	22.632.724.620,00	2.476.901.835,00	10,94
60	Kecamatan Temanggung	12.432.399.897,00	2.820.611.220,00	22,69
61	Kelurahan Temanggung I	487.665.600,00	49.486.932,00	10,15
62	Kelurahan Temanggung II	437.443.374,00	27.943.801,00	6,39
63	Kelurahan Butuh	492.198.850,00	46.565.326,00	9,46
64	Kelurahan Jampireso	665.542.250,00	33.592.707,00	5,05
65	Kelurahan Jampirejo	653.179.140,00	32.512.279,00	4,98
66	Kelurahan Kertosari	476.478.990,00	33.174.324,00	6,96
67	Kelurahan Banyuurip	862.453.600,00	36.776.193,00	4,26
68	Kelurahan Kowangan	585.715.850,00	33.047.706,00	5,64
69	Kelurahan Jurang	506.223.700,00	31.684.058,00	6,26
70	Kelurahan Tlogorejo	851.743.500,00	25.677.663,00	3,01
71	Kelurahan Kebonsari	439.797.650,00	32.530.772,00	7,40
72	Kelurahan Manding	578.445.800,00	32.789.374,00	5,67
73	Kelurahan Mungseng	631.157.850,00	29.403.126,00	4,66
74	Kelurahan Purworejo	468.277.870,00	41.238.507,00	8,81
75	Kelurahan Giyanti	855.596.222,00	31.750.322,00	3,71

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
76	Kelurahan Madureso	703.384.400,00	32.690.229,00	4,65
77	Kelurahan Sidorejo	1.102.913.350,00	46.057.405,00	4,18
78	Kelurahan Walitelon Selatan	1.031.982.390,00	32.088.037,00	3,11
79	Kelurahan Walitelon Utara	800.952.700,00	32.707.920,00	4,08
80	Kecamatan Tembarak	1.790.967.878,00	420.931.312,00	23,50
81	Kecamatan Pringsurat	2.241.337.451,00	534.167.909,00	23,83
82	Kecamatan Kaloran	2.060.501.300,00	473.041.928,00	22,96
83	Kecamatan Parakan	2.998.522.881,00	729.192.680,00	24,32
84	Kelurahan Parakan Kauman	835.598.899,00	29.441.146,00	3,52
85	Kelurahan Parakan Wetan	426.406.453,00	20.227.668,00	4,74
86	Kecamatan Bulu	1.839.140.395,00	390.819.539,00	21,25
87	Kecamatan Kedu	1.699.423.340,00	375.548.975,00	22,10
88	Kecamatan Kandangan	1.962.343.828,00	435.624.906,00	22,20
89	Kecamatan Candirotto	2.061.162.612,00	478.579.274,00	23,22
90	Kecamatan Ngadirejo	2.982.387.954,00	690.519.577,00	23,15
91	Kelurahan Manggong	1.125.825.088,00	22.709.568,00	2,02
92	Kecamatan Jumo	1.930.512.756,00	469.649.557,00	24,33
93	Kecamatan Wonobojo	1.805.888.412,00	424.537.729,00	23,51
94	Kecamatan Kranggan	2.802.574.710,00	664.145.154,00	23,70
95	Kelurahan Kranggan	495.902.479,00	60.618.432,00	12,22
96	Kecamatan Bejen	1.869.411.391,00	438.330.408,00	23,45
97	Kecamatan Kledung	1.995.070.262,00	443.991.970,00	22,25
98	Kecamatan Bansari	1.941.805.109,00	475.226.721,00	24,47
99	Kecamatan Tlogomulyo	2.095.002.309,00	508.960.271,00	24,29
100	Kecamatan Selopampang	1.830.153.352,00	410.310.711,00	22,42
101	Kecamatan Gemawang	1.801.237.659,00	380.708.836,00	21,14
102	Kecamatan Tretep	1.929.562.353,00	472.151.207,00	24,47
103	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.170.628.840,00	944.142.879,00	13,17
	JUMLAH	2.074.895.563.218,00	317.638.563.790,00	15,31

Sumber BPKPAD, 2025

Capaian kinerja keuangan Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar 15,31 % capaiannya masih sangat rendah.

2.2 Evaluasi Kinerja Utama

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran dan indikator program terhadap target RPD 2024-2026 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel 2.1

Tabel 2.2
Simbol dan Status Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPD 2024-2026, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja indikator kinerja utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,86	72,77	71,86	100,00	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,53	7,95	7,53	94,72	Sangat Tinggi	Dindikpora
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,62	12,65	12,62	99,76	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,98	4,23	3,98	94,09	Sangat Tinggi	Dindikpora
		Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	3,9	4,23	3,98	77,95	Tinggi	Dindikpora
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,67	4,66	3,67	78,76	Tinggi	Dinbudpar
	Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	4,5	4,66	4,5	98,78	Sangat Tinggi	Kesbangpol
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,94	75,72	75,94	100,00	Sangat Tinggi	Dinkes
	Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,19	95,77	96,27	100,00	Sangat Tinggi	DPPPAPPKB
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,28	5,04	95,94	Sangat Tinggi		
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Pendapatan Per kapita	Ribu Rp	33,43	33,5	35,94	100,00	Sangat Tinggi	Dinkominfo
	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka	7,7	8,1	8,67	93,43	Sangat Tinggi	Dinkominfo
		Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)	Angka	19,52	19	17,83	93,84	Sangat Tinggi	Dinkominfo
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	2,35	2,51	2,35	100,00	Sangat Tinggi	Dinkominfo
	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	79,03	75,2	78,87	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah	
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	68,25	64,05	68,25	100,00	Sangat Tinggi	DPRKPLH	
		Indeks Rasa Aman	Angka	4,65	4,69	4,65	99,15	Sangat Tinggi	Satpol PP	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	*86,01	B/>60-70	86,01	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi	
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.	IPKD	Angka	73,66	66	73,66	100	Sangat Tinggi	BPKPAD
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Indeks Merit System	angka	0,62	0,55	0,62	100	Sangat Tinggi	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat	66,36	B/>60-70	*66,36	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91	B/76,61-88,30	*86,91	100	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi	
RATA-RATA INDIKATOR TUJUAN							98,43	Sangat Tinggi		
RATA-RATA INDIKATOR SARASAN							92,48	Sangat Tinggi		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025, data diolah

Rata-rata capaian pada indikator Tujuan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yaitu 98,43% dengan status Telah Tercapai, sedangkan rata-rata indikator sasaran yaitu 92,48% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

2.3 Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan terdiri dari 8 indikator kinerja sasaran dan 37 indikator kinerja program sebagaimana ditampilkan tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan s.d Triwulan I Tahun 2025

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Sasaran IKUPD								
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	%	77,78	57,1	88,46	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	99,13	98,39	98,85	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	98,52	91,57	95,06	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal terakreditasi minimal B	%	83,33	36	77,27	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
Meningkatnya Akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 5-6 tahun	%	56,23	100	89,75	89,75	Tinggi	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 7-12 tahun	%	54,19	100	98,41	98,41	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk usia 13-15 tahun	%	85,14	100	95,77	95,77	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	40,10	100	63,74	63,74	Sedang	Dindikpora
RATA-RATA						92,82	Sangat Tinggi	
Indikator Program								
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APM PAUD (5-6 tahun)	%	47,73	81,72	90,72	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (0-6 tahun)	%	51,39	44,55	42,36	95,09	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (4-6 tahun)	%	56,73	77,75	83,48	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK PAUD (5-6 tahun)	%	61,89	90,55	101,46	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4 Pendidikan Guru PAUD/Bimbingan Konseling/Psikologi	%	54,18	90,55	90,00	90,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	69,97	49,99	78,90	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Jumlah Kepala Satuan PAUD berkualifikasi Akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	67,20	100	97,40	97,40	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas dan Penilik PAUD	%	0,03	0,03	0,02	74,19	Sedang Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase ruang kelas TK Negeri dalam kondisi baik	%	100,00	100	100,00	100,00		
	Persentase APM SD Sederajat	%	75,98	98,7	95,49	96,75	Sangat Tinggi Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK SD Sederajat	%	136,63	104,69	100,17	95,68		Dindikpora
	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,016	0,01	0,064	0,00	Sangat Rendah	Dindikpora
	Rasio Siswa/Guru SD	angka	01.20	01.28	1:17	87,50	Sedang	Dindikpora
	Rasio Siswa/Rombel SD	angka	01.14	1.28	1:13	82,95	Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SD memiliki kualifikasi Akademik Minimal S1/D4	%	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	25,92	100	80,48	80,48	Tinggi	Dindikpora
	Persentase Kepala SD memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase tenaga penunjang lain di SD yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	25,92	100	89,48	80,48	Tinggi	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas SD	%	0,03	0,1	0,05	46,08	Sangat Rendah	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	94,92	91,49	91,49	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APM SMP Sederajat	%	81,98	89	84,03	94,42	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase APK SMP Sederajat	%	98,19	98,77	103,50	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	98,19	98,9	94,13	95,17	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	angka	0,21	0,16	0,08	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Rasio Siswa/Guru SMP	angka	01.17	01.32	10.17	83,70	Tinggi	Dindikpora
	Rasio Siswa/Rombel SMP	angka	01.11	01.32	01.11	77,17	Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4	%	91,09	100	95,45	95,45	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	56,64	66,25	64,00	96,90	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Kepala SMP memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak	%	90,70	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase tenaga penunjang lain di SMP yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	40,33	100	47,14	47,14	Sangat Rendah	Dindikpora
	Rasio Jumlah Pengawas SMP	%	0,06	0,08	0,05	58,82	Rendah	Dindikpora
	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	94,39	96,67	64,74	66,97	Sedang	Dindikpora
	Persentase Pendidik Kesetaraan memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu	%	77,78	100	92,23	92,23	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Non Formal memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4	%	96,15	100	96,30	96,30	Sangat Tinggi	Dindikpora

Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
				Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat	%	47,62	100	97,56	97,56	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha (kesanggupan memenuhi indikator)	%	89,51	90	89,51	99,46	Sangat Tinggi	Dindikpora
	Persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari Dudi	%	51,06	20	60,20	100,00	Sangat Tinggi	Dindikpora
RATA-RATA							88,28	Tinggi

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian IKUPD sebesar 93,46% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi. Rata-rata capaian indicator program sebesar 88,28% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Pada IKUPD masih ada 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah dan 3 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 31 indikator kinerja program serta di RSUD terdiri dari 1 indikator kinerja program dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	0,197	0,15	0,197	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	61,01	72	12,20	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	11,84	12,8	3,24	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100,00	100	21,56	21,56	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maksimal	11,46	13,44	11,35	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100,00	100	20,53	20,53	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100,00	100	20,53	20,53	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100,00	100	20,53	20,53	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	20,31	20,31	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal	per 1.000 KH	8,42	9,15	0,49	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	96,00	100	19,34	19,34	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	14,28	15,6	4,15	100,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,16	0,3	0,13	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% maksimal	11,29	14	11,67	100	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% minimal	89,09	82,6	91,20	100	Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,80	100	23,67	23,67	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,21	100	25,30	25,30	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,61	100	26,17	26,17	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	76,36	64	78,18	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,03	100	20,55	20,55	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	108,20	100	34,99	34,99	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	106,77	100	35,59	35,59	Sanagt Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	127,35	100	36,43	36,43	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	96,28	100	30,00	30,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar							
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penduduk	10,48	7	1,46	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	102,33	85	15,07	17,73	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah sehat	%	86,16	82,4	87,93	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100	98,4	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	100	100	15,38	57,19	Rendah	Dinas Kesehatan
		Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	97,77	84,03	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	RSUD
RATA-RATA							59,05	Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, capaian rata-rata indikator IKUPD pada bidang kesehatan sebesar 100% dengan skala Sangat Tinggi. Status Rata-rata capaian pada indikator program bidang kesehatan sebesar 59,05% dengan skala capaian Rendah. Masih ada 1 indikator program dengan nilai skala nilai peringkat kinerja rendah dan 16 indikator program dengan skal nilai peringkat kinerja sangat rendah.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran dan 11 indikator kinerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 1 indikator program kinerja pada dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d. Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	85,07	84,64	84,41	99,73	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Sesuai rencana tata ruang	%	90,18	89,51	90,18	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
	RATA-RATA						99,87	Sangat Tinggi	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59,36	59,37	59,36	99,98	Sangat Tinggi	DPUPR
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	98,67	97,90	98,67	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	97,65	95,70	97,65	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	100,00	100	0	0,00	Sangat Rendah	DPUPR
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	69,15	69,34	69,15	99,72	Sangat Tinggi	DPUPR
4.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	68,61	73,97	68,61	92,75	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase terbangunnya gedung pemerintah	%	93,42	100	0	0,00	Sangat Rendah	DPUPR
5.	Program Penyelenggara Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi mantap	%	88,92	89,5	87,47	97,73	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase jembatan Kabupaten Kondisi baik	%	94,36	94	93,18	99,13	Sangat Tinggi	DPUPR
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	22,59	19,61	22,59	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR
6.	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	90,18	89,51	90,18	100,00	Sangat Tinggi	DPUPR

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	DPRKPLH
	RATA-RATA						80,85	Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata Capaian pada indikator IKUPD yaitu 99,87% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, sedangkan rata-rata indikator program yaitu 80,85% dengan skala nilai peringkat kinerja Tinggi. Masih ada 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 6 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman s.d. Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Sasaran IKUPD									
1.	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	99,34	99,03	99,34	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	59,63	53,30	59,63	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	87,84	83,87	87,84	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	
Indikator Program Perangkat Daerah									
1.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	3,69	4,11	3,69	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	95,29	88,40	95,29	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase rumah layak huni	%	96,31	95,89	96,31	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	3,63	4,82	3,63	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
2.	Program Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	DPRKPLH
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian indikator IKUPD dan indikator program yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran dan 7 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	51,11	100	53,55	53,55	Rendah	Satpol PP Damkar
		cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	Angka	682	305	184	60,33	Rendah	Satpol PP Damkar
RATA-RATA							71,29	Sedang	
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	3118,69	6,92	3118,69	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
		Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	Rasio	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
		Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100	199	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	50,65	80	54,55	68,18	Sedang	Satpol PP Damkar
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	42,06	100	45,45	45,45	Sangat Rendah	Satpol PP Damkar
		Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	0	100	0	0	Sangat Rendah	Satpol PP Damkar
		Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	2,56	6,15	0,43	6,95	Rendah	Satpol PP Damkar
RATA-RATA							60,08	Rendah	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Dalam tabel IKUPD terdapat 2 indikator yang masih dalam status capaian rendah dengan rata – rata capaian IKUPD sebesar 71,29%. Rata-rata indikator program 60,08% dengan skala nilai peringkat kinerja sedang. Masih terdapat 1 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja rendah dan 2 indikator dengan skala nilai peringkat kinerja sangat rendah.

Urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran, dan 3 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	angka	20,92	141,15	105,76	100	Sangat Tinggi	BPBD
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	Sanga
1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPBD
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	BPBD
RATA-RATA							100	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah

Rata-rata capaian bidang Penyelenggaran Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Fungsi Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada indikator IKUPD dan indikator program yaitu 100% dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Sosial terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran dan 13 indikator kinerja program, dengan capaian kinerja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial s.d Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	68,12	63	52,54	77,11	Rendah	Dinas Sosial
RATA-RATA							77,11	Rendah	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
4.	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	0	0	Sangat Rendah	Dinas Sosial
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

No.	Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RPJMD s.d. Tahun 2025 (%)	Skala Nilai Peringkat Kinerja	Perangkat Daerah
					Target 2025	Realisasi s.d TW I Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	%	86,38	60	97,22	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	51,37	48	51,37	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
	RATA-RATA						92,31	Sangat Tinggi	

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, 2025 data diolah